

11. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. RENSTRA merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra PD merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan Penyusunan perubahan Renstra PD perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; memana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Dalam Renstra PD juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan PD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra PD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra PD sesuai tupoksi PD. Dengan demikian, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan ketersediaan lingkungan hidup di Kota Blitar yang baik dan sehat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar perlu menyusun Renstra DLH Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

Dalam tahun berjalan seperti saat ini, Dokumen Renstra DLH dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa asumsi yang disusun pada tahun perencanaan. Penyusunan perubahan Renstra DLH dilaksanakan sebagai tindak lanjut pemutakhiran

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Tindaklanjut evaluasi SAKIP tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Dengan demikian, terdapat perubahan atas sebagian nomenklatur subkegiatan beserta indikatornya, serta penyesuaian target kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan perubahan kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

- Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2021-2026 Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama lima tahun.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi, misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DLH, fungsi Renstra DLH dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses Penyusunan perubahan Renstra DLH, Keterkaitan Renstra DLH dengan RPJMD, K/L dan Renstra Provinsi dan Renja DLH.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi kewenangan DLH, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLH.

1.3. Maksud dan Tujuan Renstra

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan perubahan Renstra DLH.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DLH, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DLH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DLH dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DLH dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DLH periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DLH yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DLH ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DLH.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DLH beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan visi, misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Mengemukakan tugas dan fungsi DLH yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DLH yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan DLH yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra DLH Provinsi dan Kota Blitar.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DLH yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra DLH.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah DLH

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DLH.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
- d. perumusan kebijakan teknis pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan;
- f. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan peyuluhan lingkungan hidup di masyarakat;
- g. penyusunan kebijakan teknis penghargaan lingkungan hidup di masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan persampahan tingkat kota;
- i. penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- j. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
- k. pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- l. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- m. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- o. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- r. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Pejabat Fungsional.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas. Untuk membantu tugas – tugas dari Sekretariat maka dibantu oleh sub bagian-bagian.

- Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Umum, dan Keuangan.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program unit kerja secara terpadu;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- e. pengkoordinasian dan Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan perubahan penetapan kinerja;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
- o. pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;

- p. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- q. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- r. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- s. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- t. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- u. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup.;
- v. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- w. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- x. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Lingkungan Hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
- â. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar terdiri atas 3 bidang, yaitu:

1. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan atau disingkat dengan P3KL, yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Tata Lingkungan. Fungsi yang melekat pada bidang ini meliputi :

- a. penyusunan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH);
- i. penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- j. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- l. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah;

- m. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- n. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- o. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- p. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan, persetujuan lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- q. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan);
- r. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup;
- s. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
- t. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- u. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
- v. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- w. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- x. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- y. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- z. sosialisasi tata cara pengaduan;
- aa. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
- bb. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan;
- cc. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan;
- dd. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan;
- ee. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- ff. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- gg. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- hh. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- jj. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- kk. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ll. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- mm. pengembangan data dan akses informasi lingkungan;
- nn. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- oo. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- pp. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- qq. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- rr. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- ss. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- tt. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- uu. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3. Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu;
- f. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- g. perumusan kebijakan penanganan sampah di kota;
- h. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- i. pembangunan sarana prasarana persampahan;
- j. penyediaan sarpras penanganan dan pengurangan sampah;
- k. pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- w. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- x. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- y. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- z. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;

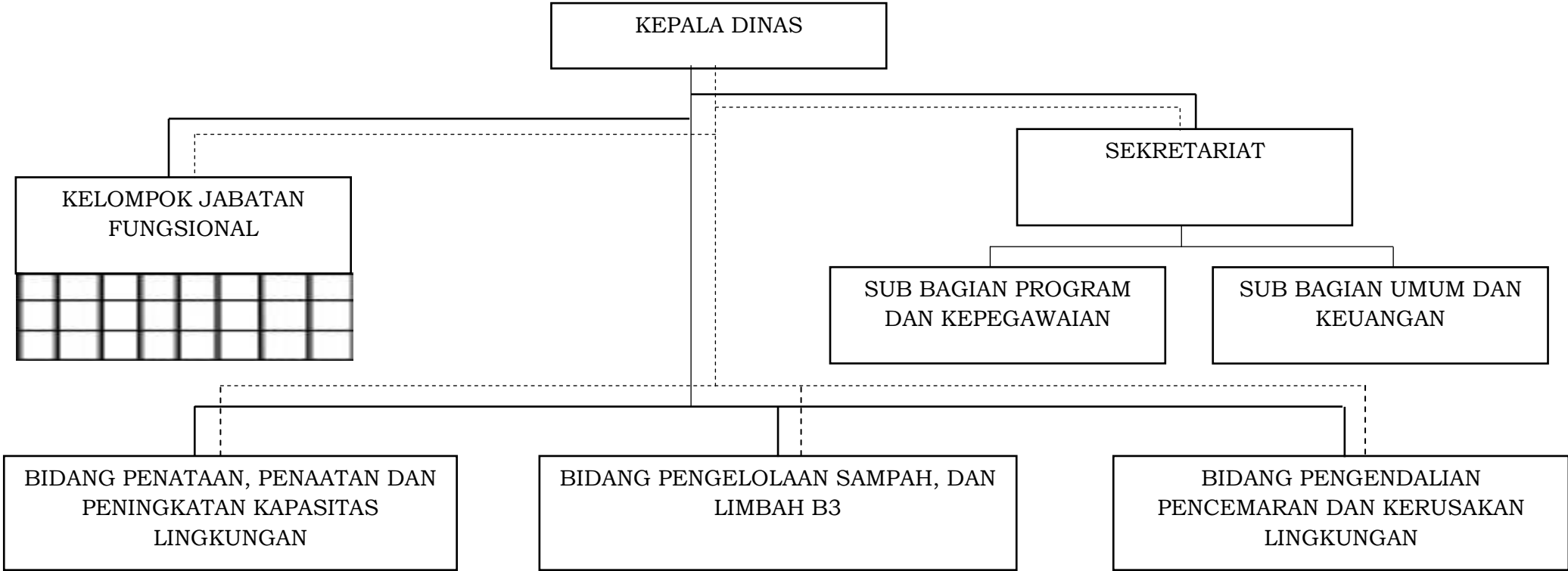
- aa. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- bb. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- cc. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- dd. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah;
- ee. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ff. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- gg. pembentukan tim penilai pendukung penghargaan adipura;
- hh. melakukan dukungan program pemberian penghargaan adipura;
 - ii. melaksanakan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- jj. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebersihan kota;
- kk. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- ll. melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- mm. sosialisasi dan pengembangan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah;
- nn. pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- oo. fasilitasi kegiatan pembersihan sampah di jalan-jalan dan tempat-tempat umum;
- pp. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi :

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- k. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan;
- l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- aa. pelaksanaan pembangunan dan penataan taman, monumen, tugu dan air mancur;
- bb. pelaksanaan, pengadaan sarana dan prasarana taman kota;
- cc. pelaksanaan inventarisasi jenis, jumlah satuan, luas taman, monumen, tugu dan air mancur;
- dd. pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan taman, monumen, tugu dan air mancur;
- ee. pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan kelistrikan taman kota;
- ff. pengumpulan, pengelolaan dan pelaksanaan pembibitan tanaman;
- gg. pengawasan dan pengendalian proses pembibitan tanaman;
- hh. melakukan pemeliharaan terhadap jalur hijau dan taman lainnya;
- ii. menyiapkan prasarana beserta kelengkapannya dalam rangka pemeliharaan terhadap jalur hijau dan taman lainnya;
- jj. pengelolaan penjualan hasil penebangan pohon dan hasil pemanfaatan sarana fasilitas umum seperti kebun rojo dan taman kota lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- kk. melakukan koordinasi pengembangan penghijauan kota;
- ll. perumusan kebijakan penghijauan kota;
- mm. pemantauan dan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
- nn. pembinaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- cc. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Gambar 2.1 SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar didukung dengan keberadaan SDM dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per November 2023 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar didukung keberadaan 48 orang PNS Daerah dan 10 orang PTT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Data Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan Ruang	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV / c	-	1	1
2	IV / b	-	-	0
3	IV / a	1	1	2
4	III / d	5	3	8
5	III / c	2	-	2
6	III / b	1	1	2
7	III / a	5	3	8
8	II / d	11	-	11
9	II / c	5	-	5
10	II / b	1	-	1
11	II / a	5	-	5
12	I / d	3	-	3
13	I / c	-	-	0
14	I / b	-	-	0
15	I / a	-	-	0
16	PTT	6	4	10
TOTAL		45	13	58

Tabel 2.2.2
Data Pegawai Menurut Pendidikan

No	Golongan Ruang	Jenis Kelamin (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	PNS			
1	S2 (Pasca Sarjana)	2	-	2
2	S1 (Sarjana)	6	7	13
3	Diploma III	2	1	3
4	Diploma II	-	-	0
5	Diploma I	-	-	0
6	SLTA	21	1	22
7	SLTP	4	-	4
8	SD	4	-	4
Jumlah PNS		39	9	48
	PTT			
1	S2 (Pasca Sarjana)	-	-	0
2	S1 (Sarjana)	-	1	1
3	Diploma III	-	-	0
4	Diploma II	-	-	0
5	Diploma I	-	-	0
6	SLTA	5	3	7
7	SLTP	-	-	0
8	SD	1	-	1
Jumlah PTT		6	4	10

b. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Tanah terdiri dari :
 - ✓ Tanah sekitar sumber mata air Gedog
 - ✓ Taman Pecut
 - ✓ Taman Kehati
 - ✓ TPA
 - ✓ Taman Rembang
 - ✓ Taman Jaten
 - ✓ Taman Sentul
 - ✓ Kebon Rojo
 - ✓ Aloon – Aloon
 - ✓ Kebun bibit Tanjungsari
 - ✓ Taman eks Kelurahan Pakunden
 - ✓ Taman eks Kelurahan Bendo
 - ✓ Taman eks Kelurahan Rembang
 - ✓ Taman Jembatan Merah
 - ✓ Taman Jalan Sumatra

2) Bangunan gedung terdiri dari :

- ✓ Gedung Kantor DLH Kota Blitar
- ✓ Gedung Kantor TPA
- ✓ Gedung Gudang Garasi
- ✓ Gedung TPST 3 R di Kelurahan Blitar
- ✓ Gedung Kantor IPLT

3) Alat transportasi terdiri dari :

- ✓ Kendaraan roda 3 viar : 14 unit
- ✓ Truck tangki untuk sedot tinja : 2 unit
- ✓ Dump Truck : 5 unit
- ✓ Truck armroll : 11 unit
- ✓ Pick up : 2 unit
- ✓ Mobil ford : 1 unit
- ✓ Kijang operasional : 2 unit
- ✓ Sepeda motor : 10 unit
- ✓ Wheelloader : 1 unit
- ✓ Sky lift : 2 unit
- ✓ Excavator : 1 unit
- ✓ Bulldozer : 1 unit

c. Sumber Daya Lainnya

Pengelolaan sampah kota adalah hal yang sangat penting karena menyangkut keberlanjutan kegiatan di perkotaan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang- undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kegiatan pengelolaan sampah dibagi menjadi dua hal yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan di sumber sampah seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, pertokaan, dan sebagainya dengan melakukan kegiatan 3R (reduce, reuse dan recycle) yang diimplementasikan dalam kegiatan pemilahan, bank sampah, komposting dan daur ulang. Sementara itu, kegiatan penanganan sampah meliputi beberapa sub sistem kegiatan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Lebih lanjut, dalam penanganan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga regulasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sejalan dengan amanat perundangan tersebut, Kota Blitar telah melakukan berbagai upaya pengelolaan sampah baik kegiatan pengurangan maupun penanganan sampah. Upaya pengurangan sampah telah dilakukan di tingkat rumah tangga dengan menggandeng komunitas warga melakukan pemilahan, pengumpulan sampah, komposting skala rumah tangga dan membuat bank sampah. Selain itu, Kota Blitar juga telah mengembangkan kegiatan penanganan sampah berupa pengolahan sampah di tingkat kawasan berupa TPS 3R di beberapa tempat yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Blitar.TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Selain itu, dalam rangka menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati di Kota Blitar dapat berlangsung dengan sebaik – baiknya maka diperlukan langkah – langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan. Keberlanjutan keanekaragaman hayati harus dijamin keberadaannya sehingga

diperlukan pelestarian spesies dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam. Dan yang terbaru di Tahun 2021 telah dibangun Taman Kehati . Adapun fungsi dari taman tersebut adalah :

1. Menambah RTH dan paru- paru kota;
2. Sebagai tempat untuk menyelamatkan berbagai jenis tanaman dan satwa lokal;
3. Pengembangan sarana rekreasi karyawisata ekowisata;
4. Sarana penelitian dan konservasi aneka jenis tanaman lokal dan satwa langka;
5. Sarana pengetahuan bagi masyarakat tentang tanaman dan satwa langka.

Selain taman-taman Kota Blitar juga memiliki beberapa lokasi sumber mata air yang tersebar diseluruh wilayah Kota Blitar dengan jumlah keseluruhan 39 lokasi. Kondisi mata air mulai mengkhawatirkan karena banyak yang debitnya mengecil bahkan terancam mati. Hal ini tentunya memerlukan penanganan serius. Berikut adalah data eksisiting 31 mata air yang sudah diukur debitnya sampai tahun 2020 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.3
Nama, Lokasi, Luas dan Debit Sumber Mata Air
Kota Blitar

No	Nama	Kecamatan/Ke- lurahan	Koordinat		< Link Lokasi Google Maps>	Luas (m ²)	Debit (L/det)	KET
			Latitud e	Longitu de				
		Kecamatan Sananwetan						
1	Sumber Kotes	Sananwetan	- 8,09603610	112,186578	bit.ly/Lok SumberK otes	39,87	2,07	
2	Sumber Ngrebo	Gedog	- 8,0991833	112,188522	bit.ly/Lok SumberN grebo	17,49	5,00	
3	Sumber Ngegong	Gedog	- 8,0880944	112,190394	bit.ly/Lok SumberN gegong	131,62	0,74	*)
4	Sumber Gedog	Bendogerit	- 8,0793939	112,187368	bit.ly/Lok SumberG edog	19,78	0,85	
5	Sumber Sendang	Bendogerit	- 8,0939778	112,173931	bit.ly/Lok SumberS endang	121,93	N/A	Saluran berada di posisi yang sulit untuk diukur
6	Sumber Urung-urung	Bendogerit	- 8,0942278	112,182881	bit.ly/Lok SumberU rung	0	N/A	Tidak bisa diukur karena tertimbun sampah sangat tebal
7	Sumber Nglobong	Sananwetan	- 8,1010944	112,178042	bit.ly/Lok SumberN globong	57,16	31,71	
8	Sumber Belik Kotak	Plosokerep	- 8,2250110	112,1660560	bit.ly/Lok BelikKota k	76,68	2,08	
9	Sumber Gempur	Klampok	- 8,1258750	112,1611220	bit.ly/Lok SumberG empur	32,58	3,69	**)
10	Sumber Ubalan	Klampok	- 8,1211417	112,1665530	bit.ly/Lok SumberU balan	102,94	23,57	
11	Sumber Mbah Bawuk	Karangtengah	- 8,1117750	112,167286	bit.ly/Lok SumberM bahBawu k	67,97	18,02	
12	Sumber Waung	Karangtengah	- 8,117714	112,170872	bit.ly/Lok SumberW aung	17,57	2,964	
13		Kecamatan Kepanjenkidul						
14	Sumber Saman	Sentul	- 8,0749417	112,1864420	bit.ly/Lok SumberS aman	80,21	4,17	
15	Sumber Mbah Judel	Sentul	- 8,0680056	112,1898690	bit.ly/Lok SumberM bahJudel	122,5	N/A	Tidak ada air keluar ke saluran, hanya mengisi kolam
16	Sumber Kucur	Sentul	- 8,0762283	112,1812780	bit.ly/Lok SumberK ucur	6,44	0,17	
17	Sumber Ipik	Sentul	- 8,0680	112,196669	bit.ly/Lok SumberIp	15,2	0,953	

No	Nama	Kecamatan/Ke- lurahan	Koordinat		< Link Lokasi Google Maps>	Luas (m ²)	Debit (L/det)	KET
			Latitud e	Longitu de				
			14		ik			
18	Sumber Bents	Kepanjenkidul	- 8,1029300	112,1619760	bit.ly/Lok SumberBents	0,5	0	
19	Sumber Jajar	Ngadirejo	- 8,0630194	112,1731750	bit.ly/Lok SumberJajar	319,5	11,73	
20	Sumber Dongki	Kepanjenkidul	- 8,103400	112,169536	bit.ly/Lok SumberDongki	2,25	0,2	
21	Sumber Mbah Jati	Bendo	- 8,092322	112,164458	bit.ly/Lok SumberMbahJati	7,77	3,25	
22	Judelan	Ngadirejo	- 8,058298	112,185195	bit.ly/Lok SumberJudelan	15,2	3,04	
23		Kecamatan Sukorejo						
24	Sumber Rondo Kuning	Tlumpu	- 8,1170833	112,1498670	bit.ly/Lok SumberRondoKuning	52,33	4,07	**))
25	Sumber Tiloro	Blitar	- 8,1063222	112,1438170	bit.ly/Lok SumberTiloro	36,8	0	
26	Sumber Wayuh	Pakunden	- 8,0938389	112,1457500	bit.ly/Lok SumberWayuh	86,51	9,235	
27	Sumber Jaran	Pakunden	- 8,0949806	112,1489420	bit.ly/Lok SumberJaran	968	25,86	
28	Sumber Belik Pitik	Pakunden	- 8,0886278	112,1417470	bit.ly/Lok BelikPitik	15,5	N/A	Tidak ada air keluar ke saluran, hanya mengisi kolam
29	Sumber Tanjung sari	Tanjungsari	- 8,0866861	112,1561060	bit.ly/Lok SumberTanjungsa- ri	23,1	0,83	*)
30	Sumber Dimoro	Sukorejo	- 8,0920917	112,1596750	bit.ly/Lok SumberDimoro	1,5	0,36	
31	Sumber Kerantil	Sukorejo	- 8,0916778	112,1566610	bit.ly/Lok SumberKerantil	161,4	N/A	Tidak bisa diukur karena tidak ditemukan saluran outlet
32	Sumber Lumbu	Pakunden	- 8,0950667	112,1547280	bit.ly/Lok SumberLumbu	22,95	2,98	
33	Sumber Jati	Turi	- 8,1064694	112,1554810	bit.ly/Lok SumberJati	3,1	4,08	
34	Sumber Krempul	Karangsari	- 8,114967	112,159817	bit.ly/Lok SumberKrempul	6,25	1,52	
35	Sumber Lanang	Pakunden	- 8,094500	112,155086	bit.ly/Lok SumberLanang	14,03	17,28	
36	Sumber Wedok	Pakunden	- 8,094392	112,155186	bit.ly/Lok SumberWedok	13,15	2,89	

No	Nama	Kecamatan/Ke- lurahan	Koordinat		< Link Lokasi Google Maps>	Luas (m ²)	Debit (L/det)	KET
			Latitud e	Longitu de				
37	Sumber Ipik	Sentul	- 8,0680 14	112,196 669	bit.ly/Lok SumberIp ik	15, 2	0,9 53	
38	Sumber Mbah Jati	Bendo	- 8,0923 22	112,164 458	bit.ly/Lok SumberM bahJati	7,7 7	3,2 5	
39	Karangsari Lor	Karangsari	- 8,1072 08	112,155 531	bit.ly/Lok SumberK arangsari Lor	2,9 4	0,8 08	
	*)	Hanya 1 data dari 3 data setahun						
	**)	Ada 2 data dari 3 data setahun						

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar

Kinerja urusan lingkungan hidup Kota Blitar salah satunya dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai yang menunjukkan pencapaian kinerja di bidang lingkungan Hidup dengan melihat pada 3 (tiga) parameter yaitu:

- 1. Indeks kualitas air
- 2. Indeks kualitas udara
- 3. Indeks tutupan vegetasi

Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016-2021 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi DLH	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Indikator Tujuan																	
1	Indeks tutupan vegetasi)			41,5	41,5	41,6	41,6	41,7	51,03	54,14	54,23	54,23	38,52	122,96	130,45	130,36	130,36	92,37
2	Nilai emisi Gas Rumah Kaca (CO2eq)			208.031	207.801	207.571	207.111	206.651	265.681	262.044	367.923	380.317	392.487	72,29	73,90	22,75	16,37	10,07
3	Prosentase mata air yang berfungsi			96	96	96	96	96	96	98	98	98	98	100	102,08	102,08	102,08	102,08
4	Predikat Pengelolaan Lingkungan			Adipura Buana	Adipura Buana	Adipura Buana	Adipura Kirana	Adipura Kirana	Adipura	Adipura	Adipura	-	-	100	100	100	-	-
5	Indeks Pencemaran Air			53	54	55	56	57	50	54,67	55,33	56,32	51,58	94,33	101,2	100,6	100,57	90,49
6	Indeks Pencemaran Udara			98	98	98	99	99	84,80	84,81	82,77	82,63	83,76	86,53	85,66	84,45	83,46	84,61
8	Prosentase rumah tangga yang terlayani IPAL komunal			5,5	5,6	5,6	5,7	5,8	5,77	6,15	6,10	6,59	6,59	103,63	107,14	116,07	115,61	113,62
9	Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan			93,8	94	94,4	94,6	95	91,38	91,88	91,74	92,10	97,84	97,42	97,74	97,18	97,36	102,99
	Indikator sasaran																	
1	Prosentase RTH yang terkelola			37,92	42,75	47,94	52,19	58,91	45,75	45,85	45,93	52,10	58,81	129,64	107,25	95,80	99,83	99,83
2	Prosentase aksi mitigasi RAD yang dilaksanakan			86	89	92	94,7	95	84,00	97,22	97,22	97,22	97,22	97,67	109,23	105,67	102,66	102,34

[illegible]

[illegible]

	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui:

1. Indeks tutupan vegetasi dengan realisasi sebesar 54,23. Capaian indeks tutupan vegetasi dua tahun terakhir menunjukkan angka yang tetap dengan faktor penunjang antara lain dipengaruhi oleh program pemerintah yang semakin fokus pada pembangunan taman kota.
2. Indikator nilai emisi gas rumah kaca terealisasi pada Tahun 2020 sebesar 380.317 CO₂eq mengalami kenaikan dari 367.923 CO₂eq pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya peningkatan pemakaian energi seiring dengan kenaikan jumlah penduduk di Kota Blitar.
3. Realisasi capaian persentase mata air yang berfungsi sebesar 98% pada tiga tahun terakhir. Hal tersebut dapat tercapai salah satunya merupakan hasil dukungan dari kegiatan konservasi mata air yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar.
4. Predikat pengelolaan lingkungan di Kota Blitar mencapai Adipura pada tahun 2017-2019, dan terkait target Adipura Buana bahwa sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa konsep penghargaan Adipura Buana untuk tahun 2019 dihapuskan. Pencapaian ini antara lain dengan adanya dukungan masyarakat Kota Blitar yang semakin meningkat pemahamannya terhadap tata Kelola kebersihan lingkungan. Sedangkan pada tahun 2020 KLHK tidak menyelenggarakan kegiatan Adipura dikarenakan adanya pandemi covid-19.
5. Indeks pencemaran air Kota Blitar terealisasi sebesar 56,32 dari target yang ditetapkan sebesar 56. Hal ini merupakan hasil dukungan dari program pembinaan IPAL Komunal, limbah Industri Rumah Tangga dan Program Kali Bersih atau disebut dengan Prokasih. Namun yang masih perlu diwaspadai adalah terkait pembuangan limbah industri yang tanpa melalui proses pengelolaan.
6. Indeks pencemaran udara Tahun 2021 terealisasi sebesar 83,76. Belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 99. Hal ini disebabkan antara lain adalah semakin meningkatkan polutan dari CO₂ yang dikeluarkan dari asap kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Ada perubahan metode perhitungan menjadi metode passive sampler pada 4 (empat) tahun terakhir yaitu 2018, 2019, 2020, dan 2021. Meskipun mengalami penurunan, namun nilai hasil pengujian laboratorium kualitas udara di Kota Blitar masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019.
7. Persentase rumah tangga terlayani IPAL Komunal Tahun 2021 terealisasi sebesar 6,59% dari target yang ditetapkan sebesar 5,8%. Hal ini didukung antara lain adalah peningkatan sosialisasi tentang manfaat penggunaan IPAL komunal, penguatan kelembagaan agar masyarakat konsisten dalam pemeliharaan IPAL dan lainnya.
8. Persentase capaian layanan persampahan perkotaan mengalami peningkatan sebesar 5,74% dari angka 92,10% pada tahun 2020 menjadi 97,84% pada tahun 2021. Namun hasil perhitungan ini sampai dengan periode semester 1 2021, karena pada saat proses perhitungan ini jumlah penduduk berdasarkan data BPS belum rilis. Hal yang perlu diperhatikan adalah Kota Blitar dengan wilayahnya yang terbatas mengalami kendala dalam penyediaan lahan guna pembangunan TPA baru. Karena seiring berjalannya waktu, kapasitas TPA sudah penuh sehingga penggunaannya kurang optimal. Pengoptimalan pengurangan sampah dari sumbernya, perlu digalakkan guna mengurangi timbunan sampah dikirim di TPA . Sedangkan data terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai dengan Tahun 2020 Luasan RTH adalah 1.126,98 ha atau setara dengan 11,27km² atau 34,59% dengan rincian RTH Publik sebesar 517,98 Ha dan RTH Privat sebesar 609,52 Ha.

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada DLH Kota Blitar tahun 2017 - 2021

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (2016-2017) / PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN (2018-2020) / PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2021)	656.395.691	1.443.437.913	1.099.565.800	622.856.294	6.687.905.729	645.869.397	1.394.701.105	1.054.698.956	567.978.544		98,40 %	96,62 %	95,92 %	91,19 %			
Pengelolaan administrasi perkantoran			162.814.000	111.595.300				159.083.200	109.014.350				97,71 %	97,69 %		-31,46%	-31,47%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.540.000	60.600.000			60.599.832	207.453.197	53.962.338				98,53 %	89,05 %				-71,22%	-73,99%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.093.400	34.006.900				38.093.400	33.656.900				100%	98,97 %				-10,73%	-11,65%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.340.800	15.494.400			15.137.600	16.330.800	15.494.350				99,94 %	100%				-5,18%	-5,12%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.269.090	3.941.810			5.477.500	5.186.000	3.814.000				98,42 %	96,76 %				-25,19%	-26,46%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.639.801	16.594.804			7.743.100	9.077.500	16.480.250				77,99 %	99,31 %				42,57%	81,55%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.220.000	6.672.000			6.726.000	6.025.500	5.790.000				73,30 %	86,78 %				-18,83%	-3,91%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	295.013.700	254.642.000	478.514.400	135.515.889		295.013.700	240.045.196	475.507.667	126.328.100		100%	94,27 %	99,37 %	93,22 %		27,36%	26,96%
Penyusunan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan sarana prasarana perkantoran			431.237.400	347.947.105				393.376.289	304.883.694				91,22 %	87,62 %		-19,31%	-22,50%
Penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan perangkat daerah			25.000.000	25.798.000				24.862.500	25.757.500				99,45 %	99,84 %		3,19%	3,60%
Penyusunan laporan keuangan			2.000.000	2.000.000				1.869.300	1.994.900				93,47 %	99,75 %		0%	6,72%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Makanan dan Minuman	49.250.000	73.739.200				49.167.500	73.680.500				99,83 %	99,92 %				49,72%	49,86%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22.028.900	27.500.000					16.047.500				88,62 %	58,35 %				24,84%	-17,80%
Pembangunan Gedung kantor		395.483.049					394.007.000					99,63 %				0%	0%
Pengadaan perlengkapan Gedung kantor		69.384.000					67.469.000					97,24 %				0%	0%
Pengadaan peralatan Gedung kantor		112.472.400					108.816.750					96,75 %				0%	0%
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		228.375.000					227.040.000					99,42 %				0%	0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional		96.158.200					91.726.321					95,39 %				0%	0%

[illegible]

[illegible]

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.420.020.458					1.363.062.944					95,99 %						
Pembangunan Gedung kantor	518.423.000					518.123.000					99,94 %					0%	0%
Pengadaan peralatan Gedung kantor	101.730.250					100.265.100					98,56 %					0%	0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	768.095.800					713.179.844					92,85 %					0%	0%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	20.248.650					20.015.000					98,85 %					0%	0%
Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan Gedung kantor	11.522.758					11.480.000					99,63 %					0%	0%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR/PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (2017)/PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	161.325.000	60.000.000	103.735.000	70.142.800		161.190.000	57.791.000	100.605.000	67.760.000		99,92 %	96,32 %	96,98 %	96,60 %			
Pengelolaan administrasi dan kelengkapan kepegawaian			75.000.000	43.902.800				72.605.000	43.760.000				96,81 %	99,67 %		-41,46%	-39,73%
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	144.325.000	50.000.000				144.190.000	48.036.000				99,91 %	96,07 %				-65,36%	-66,69%
Pengelolaan publikasi dan informasi perangkat daerah			28.735.000	26.240.000				28.000.000	24.000.000				97,44 %	91,46 %		-8,68%	-14,29%
Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD/Perangkat Daerah	17.000.000	10.000.000				17.000.000	9.755.000				100%	97,55 %				-41,18%	-42,62%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.233.550	1.352.800	4.500.000	4.485.000		14.717.750	1.352.000	4.403.650	4.303.800		96,61 %	99,94 %	97,86 %	95,96 %			

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyusunan dan pelaporan perencanaan pembangunan perangkat daerah			4.500.000	4.485.000				4.403.650	4.303.800				97,86 %	95,96 %		-0,33%	-2,27%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/perangkat daerah (2018)	6.166.050	445.800				5.784.250	445.000				93,81 %	99,82 %				-92,77%	-92,31%
Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	9.067.500	907.000				8.933.500	907.000				98,52 %	100%				-90,00%	-89,85%
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH/PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH (2018-2020) / PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (2021)	10.200.097.382	15.327.939.847	19.354.528.387	15.756.706.184,19	21.137.101.076	10.080.179.996	15.182.972.333	18.691.414.870,53	14.713.251.043,64		98,82 %	99,05 %	96,57 %	93,38 %			
Pengembangan pengelolaan persampahan			2.717.961.920	2.717.961.920,00				2.538.115.901,31	2.148.983.670,86				93,38 %	79,07 %		0,00%	-15,33%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Peningkatan sarana prasarana persampahan			7.600.521.800	3.090.739.766,71				7.144.092.342,70	2.624.696.481,30				93,99 %	84,92 %		-59,34%	-63,26%
Kemitraan pengelolaan persampahan			9.036.044.667	9.948.004.497,48				9.009.206.626,52	9.939.570.891,48				99,70 %	99,92 %		10,09%	10,33%
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	77.245.300	45.535.000				76.930.000	44.957.500				99,59 %	98,73 %				-41,05%	-41,56%
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.326.375.600	4.223.604.200				1.319.083.300	4.168.973.450				99,45 %	98,71 %				218,43%	216,05%
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	596.183.000	1.114.657.144				513.316.000	1.091.404.001				86,10 %	97,91 %				86,97%	112,62%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan		199.053.000					196.118.000					98,53 %				0%	0%
Kerjasama pengelolaan persampahan	6.773.462.661	8.065.833.851				6.805.408.196	8.056.114.582				100,47 %	99,88 %				19,08%	18,38%
Sosialisais kebijakan pengelolaan persampahan		168.805.000					167.629.000					99,30 %				0%	0%
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA	1.426.830.821	1.310.381.752				1.365.442.500	1.278.695.800				95,70 %	97,58 %				-8,16%	-6,35%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		200.069.900			438.947.800		179.080.000					89,51 %				119%	0%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					20.698.153.276											0%	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (2017-2020) / PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (2021)	291.331.100	1.227.586.875	402.864.900	594.429.340	2.498.768.831	286.478.100	1.203.801.638	398.847.145	547.113.796		98,33 %	98,06 %	99,00 %	92,04 %			
Penaatan kebijakan lingkungan hidup sektor limbah domestik			104.993.400	146.910.950				104.618.800	131.615.950				99,64 %	89,59 %		39,92%	25,81%
Pengendalian pencemaran lingkungan sektor limbah domestik			202.871.500	405.498.290				202.746.100	373.747.846				99,94 %	92,17 %		99,88%	84,34%
Pemantauan dan pengawasan lingkungan sektor limbah domestik			95.000.000	42.020.100				91.482.245	41.750.000				96,30 %	99,36 %		-55,77%	-54,36%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	96.610.000	159.137.900				95.628.000	159.137.900				98,98 %	100%				64,72%	66,41%
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	79.162.400	202.871.500				78.082.400	202.746.100				98,64 %	99,94 %				156,27%	159,66%
Pemantauan Kualitas Lingkungan	25.975.000	31.629.500				25.084.000	26.351.000				96,57 %	83,31 %				21,77%	5,05%
Pengelolaan B3 dan Limbah B3	10.277.700	10.142.550				10.277.700	10.037.550				100%	98,96 %				-1,31%	-2,34%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	79.306.000	187.912.750				77.406.000	181.338.000				97,60 %	96,50 %				136,95%	134,27%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup/Peningkatan sarana prasarana lingkungan hidup (2018)		635.892.675					624.191.088					98,16 %				0%	0%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut					1.189.366.231											0%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					1.309.402.600											0%	
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) (2017) / PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (2021)	8.096.668.195				6.559.802.599	7.990.673.900					98,69 %						
Penataan RTH	4.602.053.500					4.535.603.500					98,56 %					0%	0%
Pemeliharaan RTH	1.094.829.545					1.065.142.400					97,29 %					0%	0%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengembangan taman rekreasi	1.001.853.300					997.306.300					99,55 %					0%	0%
Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota	1.397.931.850					1.392.621.700					99,62 %					0%	0%
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					3.211.824.999											0%	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya					3.347.977.600											0%	
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	136.600.000	168.999.450	587.998.300	895.792.960		126.305.500	167.195.850	566.218.714	840.849.060		92,46 %	98,93 %	96,30 %	93,87 %			
Penaatan kebijakan lingkungan hidup			149.816.100	334.995.800				147.107.238	325.001.900				98,19 %	97,02 %		123,60%	120,93%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengendalian pencemaran lingkungan			239.299.800	301.154.910				233.624.076	278.030.410				97,63 %	92,32 %		25,85%	19,01%
Pemantauan dan pengawasan lingkungan			198.882.400	259.642.250				185.487.400	237.816.750				93,26 %	91,59 %		30,55%	28,21%
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	37.500.000	42.959.750				36.711.500	41.236.150				97,90 %	95,99 %				14,56%	12,32%
pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	99.100.000	126.039.700				89.594.000	125.959.700				90,41 %	99,94 %				27,18%	40,59%
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (2016-2017)/ KONSERVASI DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN (2018-2020)	488.757.300	6.236.602.615	17.682.178.541	4.319.698.480		477.524.500	4.542.639.245	15.688.994.025	4.144.325.496.99		97,70 %	72,84 %	88,73 %	95,94 %			
Konservasi sumber daya alam			2.204.354.500	660.979.097				2.052.258.972.98	646.767.363.32				93,10 %	97,85 %		-70,01%	-68,49%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengembangan edukasi dan komunikasi lingkungan			1.062.478.250	431.796.200				1.060.150.800	402.822.100				99,78 %	93,29 %		-59,36%	-62,00%
Pengelolaan pertamanan dan pemakaman			14.415.345.791	3.226.923.183		-		12.576.584.251,99	3.094.736.033,67				87,24 %	95,90 %		-77,61%	-75,39%
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	247.416.300										99,21 %					0%	0%
Pengendalian dampak perubahan iklim	12.600.000	95.003.000				12.202.500	94.362.000				96,85 %	99,33 %				653,99%	673,30%
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	167.890.000	346.736.500				160.070.000	341.341.500				95,34 %	98,44 %				106,53%	113,25%
Peningkatan sarana prasarana taman kota		193.582.590					182.841.400					94,45 %				0%	0%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman		106.408.000					106.408.000					100%				0%	0%
Penataan RTH		1.837.410.500					369.268.780,99					20,10 %				0%	0%
Pemeliharaan RTH		1.848.468.375					1.821.480.864					98,54 %				0%	0%
Pengembangan taman rekreasi		170.837.000					170.802.000					99,98 %				0%	0%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	13.325.000	23.906.400				12.255.000	23.211.300				91,97 %	97,09 %				79,41%	89,40%
Penyusunan kebijakan dan perencanaan perlindungan dan konservasi SDA	47.526.000	50.000.000				47.526.000	49.910.000				100%	99,82 %				5,21%	5,02%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					Rata - Rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengembangan data dan informasi lingkungan		51.276.000					48.592.000					94,77 %				0%	0%
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan		319.071.150					289.844.600					90,84 %				0%	0%
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura		146.171.700					72.230.500					49,41 %				0%	0%
Pembinaan sekolah adiwiyata		234.179.800					179.300.000					76,57 %				0%	0%
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem		104.243.000					103.828.000					99,60 %				0%	0%
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air		709.308.600					689.218.300					97,17 %				0%	0%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

b. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah :

1. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
2. Populasi penduduk yang semakin bertambah sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
3. Semakin berkembangnya kegiatan usaha – kegiatan usaha baik skala kecil, menengah maupun besar;
4. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah;
5. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan;
6. Pengawasan terkait izin lingkungan masih belum berjalan secara optimal;

Tantangan SKPD sesuai dengan isu strategis di KLHS, antara lain:

1. Pencemaran Lingkungan masih tinggi
2. Perubahan Iklim
3. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
4. Ruang Terbuka Hijau Terbatas
5. Belum tertatanya kawasan permukiman
6. Pemanfaatan Energi terbarukan belum optimal
7. Daya dukung lingkungan menurun

Adapun peluang pengembangan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, SPM Bidang Lingkungan Hidup, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), Kelurahan Berseri, Bank Sampah, dan sebagainya;
3. Adanya dukungan kerjasama dari masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah baik propinsi maupun pusat serta instansi lain yang terkait;
4. Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR (*Corporate Social Responsibility*);

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar beserta factor-faktor yang mempengaruhinya diuraikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	Bertambahnya jumlah polutan yang mempengaruhi kualitas udara	Kurang optimalnya sarana prasarana pengendali dampak perubahan iklim
		Kurangnya pemahaman masyarakat tentang emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas penduduk	Kurang optimalnya sosialisasi terkait penanganan dampak perubahan iklim
2	Belum tercapainya status Lingkungan Hidup dalam kategori baik	Masih adanya pencemaran di beberapa titik badan air	Kurang optimalnya pengolahan limbah industri, peternakan, dan domestik
			Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi badan air (sungai)
		Peningkatan gas emisi kendaraan	Kurang optimalnya pengendalian gas emisi kendaraan
		Luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik masih kurang dari yang ditetapkan undang-undang	Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk RTH publik

No.	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
3	Belum optimalnya gerakan 3R Pengelolaan Sampah dan 0 sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah di tingkat sumber sampah	Kurangnya inovasi sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah 3R dan 0 sampah
4	Peningkatan jumlah volume sampah yang dihasilkan	Keterbatasan kapasitas TPA di Kota Blitar	Keterbatasan lahan di Kota Blitar untuk pengadaan TPA baru
			Belum ada kerjasama pengelolaan persampahan dengan Pihak lain

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2021-2026 adalah “TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”.

Yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Meningkatkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dengan visi dan misi Kepala Dearh dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah terletak pada ke-4 yaitu “Meningkatkan Tata Ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan”

Adapaun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya kualitas lahan
4. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3

Dan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengendalian pencemaran air
2. Meningkatnya pendalian pencemaran udara
3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH
4. Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan
5. Meningkatnya pengelolaan limbah B3

Pilihan strategis untuk mencapai Misi ke 4 adalah :

1. Peningkatan pengendalian pencemaran air
2. Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup
3. Optimalisasi pengendalian pencemaran udara
4. Optimalisasi ketersediaan dan kualitas RTH
5. Optimalisasi pengelolaan sampah

- 6. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 7. Optimalisasi pengelolaan limbah B3

Dan untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan, sasaran dan strategis maka arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar antara lain :

- 1. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air
- 2. Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
- 3. Peningkatan pembinaan pelaku usaha
- 4. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan
- 5. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas
- 6. Optimalisasi penggunaan energi alternatif
- 7. Optimalisasi pemantauan kualitas udara
- 8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH
- 9. Optimalisasi layanan sampah perkotaan
- 10. Peningkatan pengelolaan sampah 3R
- 11. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
- 12. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 13. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
- 14. Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
- 15. Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional bidang lingkungan hidup :

Tabel 3.3.1
Capaian Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

NO	Sasaran pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 pada Tahun 2019 yang didukung oleh system data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaa alam dan lingkunhan hidup yang handal pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim	Penurunan Beban Pencemaran Air untuk parameter BOD, TSS, E-coi dan total Coli
2	Meningkatnya penanganan perubahan iklim baik kegiatan mitigasi tercermin dengan menurunnya emisi GRK di lima sector prioritas : kehutanan dan lahangambut, pertanian, energi dan transportasi, industry dan limbah, sebesar mendekato 26 persen pada tahun 2019 mapun kegiatan	Kualitas udara ambient perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)

NO	Sasaran pada Renstra Kementrian Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja
	adaptasi dengan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim khususnya di 15 (lima belas) daerah rentan yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN_API)	
3	Meningkatnya pemanfaatan IPTEK dan SDM untuk peningkatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati dan menyempurnakan panduan mengenai Langkah-langkah untuk pengelolaan dan pemanfaatn KEHATI secara berkelanjutan	Persentase sampah dan Limbah B3 yang dikelola
4	Mengarusutamakan keanekaragaman hayati (KEHATI) pada kegiatan perencanaan pembangunan nasional	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan

A. RENSTRA DLH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 - 2024

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, visi, misi, tujuan dan sasaran DLH Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.2. Visi Misi Tujuan dan Sasaran DLH Propinsi

Visi	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Sejahtera, Seimbang, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris, Inklusif, dan Menghargai Nilai – Nilai Kemanusiaan”
Misi	1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi,Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. 2.Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial,Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. 3.Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,Inovatif,Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial,Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Lima (5) program pembangunan dari DLH (Dadan Lingkungan Hidup) Propinsi Jawa Timur periode Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Program Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
3. Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam.
4. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

5. Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Kebijakan penataan ruang Kota di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;
2. Pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota;
3. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar kawasan;
4. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
5. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
6. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
7. Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;
8. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota;
9. Pelestarian kawasan cagar budaya;
10. Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang; dan
11. Penetapan kawasan-kawasan strategis kota.
12. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman untuk menurunkan dan mencegah timbulnya Kawasan kumuh baru di Kota Blitar.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

1. meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
2. memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat baik oleh pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta;
3. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
4. mengembangkan prasarana jaringan listrik dan sumber energi listrik alternatif;
5. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan pelayanan publik;
6. mengembangkan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air;
7. meningkatkan sistem pengelolaan Pengelolaan Persampahan terpadu dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
8. mengembangkan prasarana pengolahan air minum;
9. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan-kawasan pelayanan umum;
10. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal; dan
11. mengembangkan sistem jaringan drainase secara terintegrasi.

Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada, meliputi :

1. melestarikan kawasan resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
2. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya menyimpang;
3. mengelola kawasan lindung secara terpadu.

Strategi peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota, meliputi :

1. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
2. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;

3. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi hutan kota, lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya; dan
4. mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang .

Mengacu pada serangkaian telaahan keterkaitan terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Telaahan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidupm Strategis serta kondisi organisasi yang telah dilaksanakan, maka dapat ditentukan rumusan isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar sebagai berikut :

- a. Menurunnya debit sumber mata air;
- b. Terjadinya pencemaran sungai oleh limbah domestik dan limbah industri;
- c. Peningkatan volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk;
- d. Terbatasnya taman kota dan RTH publik.

Isu strategis inilah yang akan dikedepankan dalam perencanaan 5 tahun mendatang dengan melakukan upaya berikut, antara lain :

- a. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air;
- b. Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup;
- c. Peningkatan pembinaan pelaku usaha tentang lingkungan hidup;
- d. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup;
- e. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas emisi rumah kaca;
- f. Optimalisasi penggunaan energi alternatif;
- g. Optimalisasi pemantauan kualitas udara;
- h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH;
- i. Optimalisasi layanan sampah perkotaan;
- j. Peningkatan pengelolaan sampah 3R;
- k. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan;
- l. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- m. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- n. Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan;
- o. Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3.

BAB IV TUJUAN dan SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Gambaran secara rinci mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

- a. Tabel 4.1.a Tujuan, Sasaran Jangka Menengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2022.
- b. Tabel 4.1.b Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2023.
- c. Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran Jangka Menengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2024-2026.

Tabel 4.1.a
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realiasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
							2022	
							Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas air		Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu (PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) Penentuan Kategori Indeks Kualitas Air : 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	Indeks	56,32 Indeks	59,92	59,73
	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	Badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.	((Jumlah badan air yang dipantau / Jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%)	Persen	NA	80	80
Meningkatnya kualitas udara		Indeks kualitas udara	Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. (PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	Indeks	82,63 Indeks	84,53	85,9

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realiasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
							2022	
							Target	Realisasi
			HIDUP) Penentuan Kategori Indeks Kualitas Udara: 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$					
	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon. Aksi yang dilaksanakan diantaranya : pengadaan solar cell, pengadaan anjang-anjang, pengadaan lampu hemat energi, serta pengadaan bibit tanaman untuk Program Kampung Iklim	((Jumlah aksi yang dilaksanakan / Jumlah aksi yang ditetapkan) x 100%)	Persen	NA	92,86	92,86
		Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara; Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien.	((Jumlah upaya pengendalian pencemaran udara yang terlaksana / Jumlah upaya pengendalian pencemaran udara yang direncanakan) x 100%)	Persen	NA	80	80
Meningkatnya kualitas lahan		Indeks kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	Indeks	54,23 Indeks	55,23	31,5

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realiasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
							2022	
							Target	Realisasi
			Penentuan Kategori Indeks Kualitas Lahan: 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$					
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terbagi menjadi RTH Publik dan RTH Privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola pemerintah dan dapat di akses secara bebas oleh masyarakat. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau instansi bisa berupa lahan pekarangan, taman lingkungan pemukiman, taman kantor dan taman gedung komersial.	((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	Persen	NA	96,1	96,1
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3		Persentase capaian layanan persampahan	Capaian Kinerja Layanan/ Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbulan sampah x 100%)	Persen	92,10%	93	97,73
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang telah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	(Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat/Jumlah total pelaku usaha penghasil limbah B3) x 100%)	Persen	67,00%	67	
	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	Sampah yang terolah adalah seluruh sampah baik yang dilakukan penanganan maupun pengurangan. Sedangkan timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber	Jumlah Persentase penanganan sampah + persentase pengurangan	Persen	92,50%	94	97,73

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realiasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
							2022	
							Target	Realisasi
			sampah	sampah				
	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dilakukan pemantauan terhadap pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	((Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3) x 100%)	Persen	NA	70	70
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	85 (A)	84,68 (A)
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	85 (A)	84,68 (A)

Tabel 4.1.b
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realiasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
							2023	
							Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas air		Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu (PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) Penentuan Kategori Indeks Kualitas Air : 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	Indeks	56,32	61,72	61,72
	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	Badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan status mutu baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat	(Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu / jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%	Persen	NA	82,50	82,50
Meningkatnya kualitas udara		Indeks kualitas udara	Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	Indeks	82,63	85,48	85,9

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realiasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
							2023	
							Target	Realisasi
			kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. (PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) Penentuan Kategori Indeks Kualitas Udara: 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$					
	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	Kawasan yang memenuhi baku mutu adalah wilayah yang kualitas udara ambiennya memenuhi baku mutu udara . Lokasi pemantauan kualitas udara ambien harus memenuhi kriteria : 1) daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat; 2) daerah atau kawasan industri; 3) pemukiman padat penduduk; dan 4) kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.	(Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu / Jumlah kawasan yang ditetapkan) x 100%	Persen	NA	100	100
Meningkatnya kualitas lahan		Indeks kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Penentuan Kategori Indeks Kualitas Lahan: 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	Indeks	54,23	55,73	55,73

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realiasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
							2023	
							Target	Realisasi
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terbagi menjadi RTH Publik dan RTH Privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola pemerintah dan dapat di akses secara bebas oleh masyarakat. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau instansi bisa berupa lahan pekarangan, taman lingkungan pemukiman, taman kantor dan taman gedung komersial.	$((\text{Luas RTH yang terkelola} / \text{Luas RTH yang ditetapkan}) \times 100\%)$	Persen	NA	100	100
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3		Persentase capaian layanan persampahan	Capaian Kinerja Layanan/ Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	$(\text{Jumlah volume sampah terolah} / \text{jumlah total timbulan sampah} \times 100\%)$	Persen	92,10	94	97,73
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang telah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	$(\text{Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat} / \text{Jumlah total pelaku usaha penghasil limbah B3}) \times 100\%$	Persen	NA	72	72
	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	Capaian layanan sampah perkotaan adalah layanan yang diberikan dalam proses penanganan sampah, mulai dari layanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pengolahan sampah di TPA, dan pengurangan sampah pada Bank Sampah	Jumlah Persentase penanganan sampah + persentase pengurangan sampah	Persen	92,50	94,99	97,73
	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang telah melaksanakan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	$(\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik} / \text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang ditetapkan}) \times 100\%$	Persen	NA	72,5	72,5

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realiasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
							2023	
							Target	Realisasi
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	86 (A)	86 (A)
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	86 (A)	86 (A)

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Kondisi Akhir
						2021	2022	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu (PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) Penentuan Kategori Indeks Kualitas Air : 6. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 7. Baik $70 \leq x < 90$ 8. Sedang $50 \leq x < 70$ 9. Kurang $25 \leq x < 50$ Sangat Kurang $0 \leq x < 25$	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	Indeks	51,58	59,73	63,52	65,32	67,12	67,12
		Indeks kualitas udara	Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. (PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) Penentuan Kategori Indeks Kualitas Udara: 6. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 7. Baik $70 \leq x < 90$ 8. Sedang $50 \leq x < 70$ 9. Kurang $25 \leq x < 50$	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	Indeks	83,76	85,9	86,43	87,38	87,40	87,40

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Kondisi Akhir
						2021	2022	2024	2025	2026	
			Sangat Kurang $0 \leq x < 25$								
		Indeks kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Penentuan Kategori Indeks Kualitas Lahan: 6. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 7. Baik $70 \leq x < 90$ 8. Sedang $50 \leq x < 70$ 9. Kurang $25 \leq x < 50$ Sangat Kurang $0 \leq x < 25$	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	Indeks	38,52	31,5	56,23	56,73	56,78	56,78
		Persentase capaian layanan persampahan	Capaian Kinerja Layanan/ Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbunan sampah x 100%)	Persen	97,84	97,73	95,00	96,00	98,00	98
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang telah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	(Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat/Jumlah total pelaku usaha penghasil limbah B3) x 100%)	Persen	NA	60	72,00	75,00	75,00	75
	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	Badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan status mutu baik, cemar ringan, cemar sedang	(Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu / jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%	Persen	NA	NA	85,00	85,00	90,00	90

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Kondisi Akhir
						2021	2022	2024	2025	2026	
			dan cemar berat								
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	Kawasan yang memenuhi baku mutu adalah wilayah yang kualitas udara ambiennya memenuhi baku mutu udara . Lokasi pemantauan kualitas udara ambien harus memenuhi kriteria : 1) daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat; 2) daerah atau kawasan industri; 3) pemukiman padat penduduk; dan 4) kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.	(Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu / Jumlah kawasan yang ditetapkan) x 100%	Persen	NA	NA	100%	100%	100%	100%
		Persentase RTH yang terkelola	Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terbagi menjadi RTH Publik dan RTH Privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola pemerintah dan dapat di akses secara bebas oleh masyarakat. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau instansi bisa berupa lahan pekarangan, taman lingkungan pemukiman, taman kantor dan taman gedung komersial.	((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	Persen	58,81	96,10	100	100	100	100
		Persentase sampah terkelola	Sampah yang terolah adalah seluruh sampah baik yang dilakukan penanganan maupun pengurangan. Sedangkan timbunan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah	(Jumlah volume sampah terkelola / Jumlah timbunan sampah dalam satu tahun) x 100%	Persen	97,84	97,73	96,00	98,00	98,00	98
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah	Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dilakukan pemantauan terhadap pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil	Persen	NA	NA	75,00	75,00	80,00	80

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Kondisi Akhir
						2021	2022	2024	2025	2026	
		B3 yang terkelola dengan baik		limbah B3 yang terkelola dengan baik / Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang ditetapkan) x 100%							
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	83,14 (A)	84,68 (A)	87 (A)	88 (A)	89 (A)	89 (A)
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	83,14 (A)	84,68 (A)	87 (A)	88 (A)	89 (A)	89 (A)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :	Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”		
MISI 4 :	MENINGKATKAN TATA RUANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BERKEADILAN		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Peningkatan pengendalian pencemaran air	1. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air
			2. Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
		Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	1. Peningkatan pembinaan pelaku usaha tentang lingkungan hidup
			2. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup
		Optimalisasi pengendalian pencemaran udara	1. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas emisi rumah kaca
			2. Optimalisasi penggunaan energi alternatif
			3. Optimalisasi pemantauan kualitas udara
		Optimalisasi ketersediaan dan kualitas RTH	Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH
		Optimalisasi pengelolaan sampah	1. Optimalisasi layanan sampah perkotaan
			2. Peningkatan pengelolaan sampah 3R
			3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
			4. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
		Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
			2. Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
		Optimalisasi pengelolaan limbah B3	Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3
2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja. 2. Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Gambaran secara rinci mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Tabel 6.1.a Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022.
2. Tabel 6.1.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023.
3. Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026.

Tabel 6.1.a. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	Unsur Penunjang Urusan Lingkungan Hidup										
	Tujuan 1: Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	Indeks	56,32	59,92	826.305.920,00	59,73	823.952.459,00		
	Sasaran 1: Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	((Jumlah badan air yang dipantau / Jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%)	Persen	NA	80	826.305.920,00	80	823.952.459,00		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	(Jumlah titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu / Jumlah total titik sampling badan air) x 100%	Persen	52,63	54	416.953.120,00	40	356.568.369,00		
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang terlaksana dalam satu tahun	Aksi	NA	3	416.953.120,00	3	356.568.369,00		
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah kegiatan sosialisasi /pembinaan pencegahan pencemaran air	Jumlah kegiatan sosialisasi /pembinaan pencegahan pencemaran air dalam satu tahun	Kali	NA	4	416.953.120,00	4	356.568.368,00		
		Jumlah lokasi uji effluen usaha dan/atau kegiatan (ABA, IPAL usaha dan/atau kegiatan, IPAL domestik, IPLT)	Jumlah lokasi uji effluen usaha dan/atau kegiatan dalam satu tahun	Lokasi	NA	250		250			
		Jumlah petugas IPLT yang terfasilitasi extrafooding (rutin dan accidental)	Jumlah petugas IPLT yang terfasilitasi extrafooding dalam satu tahun	Orang	NA	4		4			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		Jumlah sarana pengelolaan limbah domestik yang dipelihara (truck tinja, aplikasi SIDOTI, mesin IPLT, gedung IPLT)	Jumlah sarana pengelolaan limbah domestik yang dipelihara dalam satu tahun	Unit	NA	4		4			
		Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan pencemaran air	Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan pencemaran air dalam satu tahun	Unit	NA	3		3			
		Jumlah lokasi uji kualitas udara	Jumlah lokasi uji kualitas udara dalam satu tahun	Lokasi	NA	10		10			
		Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan udara	Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan udara dalam satu tahun	Unit	NA	0		0			
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	(Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / Jumlah total kasus/aduan lingkungan hidup) x 100%	Persen	100	100	19.997.400,00	100	13.304.000,00		
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus/ aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus/ aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Kasus/ aduan	NA	2	19.997.400,00	0	13.304.000,00		
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ada di Kota Blitar	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ada di Kota Blitar dalam satu tahun	Kasus/aduan	NA	2	19.997.400,00	0	13.304.000,00		
		Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan dalam satu tahun	Kali	NA	2		2			
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	(Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup / Jumlah total pelaku usaha yang dipantau) x 100%	Persen	64	64	143.567.900,00	67	111.377.600,00		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										
2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup dalam satu tahun	Usaha	NA	60	143.567.900,00	42	111.377.600,00		
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah jenis sarana/akses informasi dan publikasi yang terlaksana	Jumlah jenis sarana/akses informasi dan publikasi yang terlaksana dalam satu tahun	Jenis	NA	2	33.796.600,00	2	28.430.000,00		
		Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan dalam satu tahun	Kali	NA	1		1			
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pembinaan bagi usaha dan/atau kegiatan	Jumlah jenis pembinaan bagi usaha dan/atau kegiatan dalam satu tahun	Jenis	NA	1	109.771.300,00	1	82.947.600,00		
		Jumlah peserta bintek penataan dokumen lingkungan bagi usaha dan / atau kegiatan	Jumlah peserta bintek penataan dokumen lingkungan bagi usaha dan / atau kegiatan dalam satu tahun	Orang	NA	200		70			
		Jumlah sarpras pelaporan yang tersedia (update aplikasi pelaporan lingkungan)	Jumlah sarpras pelaporan yang tersedia (update aplikasi pelaporan lingkungan) dalam satu tahun	Jenis	NA	1		1			
		Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang di pantau (evaluasi hasil pemantauan pengawasan)	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang di pantau (evaluasi hasil pemantauan pengawasan) dalam satu tahun	Usaha	NA	60		90			
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	(Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia / Jumlah total dokumen perencanaan lingkungan hidup) x 100%	Persen	100	100	245.787.500,00	100	342.702.490,00		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	NA	1	245.787.500,00	2	342.702.490,00		
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	NA	1	245.787.500,00	1	342.702.490,00		
		Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun	Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	NA	1		1			
	Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	Indeks	82,63	84,53	1.137.489.155,00	85,9	1.126.877.929,17		
	Sasaran 2: Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	((Jumlah aksi yang dilaksanakan / Jumlah aksi yang ditetapkan) x 100%)	Persen	NA	92,86	920.025.527,00	92,86	1.126.877.929,17		
		Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	((Jumlah upaya pengendalian pencemaran udara yang terlaksana / Jumlah upaya pengendalian pencemaran udara yang direncanakan) x 100%)	Persen	NA	80		80			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ eq)	((Nilai Proyeksi Emisi GRK - Nilai Emisi GRK hasil perhitungan http://signsmart.menlhk.go.id/)/Nilai Proyeksi Emisi GRK) x 100 %	Persen	NA	6,37	920.025.527,00	13,21	1.126.877.929,17		
		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	(Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu / jumlah total titik sampling udara ambien yang dipantau) x 100%	Persen	100	100		100			
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim dalam satu tahun	Kali	NA	3	920.025.527,00	3	1.126.877.929,17		
		Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu dalam satu tahun	Titik	NA	18		18			
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Frekwensi monev adaptasi mitigasi perubahan iklim	Frekwensi monev adaptasi mitigasi perubahan iklim dalam satu tahun	Kali	3	2	920.025.527,00	2	1.126.877.929,17		
		Jumlah aksi adaptasi perubahan iklim yang	Jumlah aksi adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan dalam satu	Aksi	NA	3		3			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		dilaksanakan	tahun								
		Jumlah peserta pembinaan program kampung iklim	Jumlah peserta pembinaan program kampung iklim dalam satu tahun	Orang	NA	180		180			
		Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan untuk mengurangi emisi GRK	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan untuk mengurangi emisi GRK dalam satu tahun	Aksi	NA	4		4			
	Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	Indeks	54,23	55,23	5.441.447.600,00	31,5	9.040.822.707,42		
	Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	Persen	NA	96,1	5.441.447.600,00	96,10	9.040.822.707,42		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	Luas RTH Publik x 100% / Luas Wilayah Kota Blitar	Persen	16,27	16,27	5.441.447.600,00	16,27	9.040.822.707,42		
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah taman kota yang terkelola	Jumlah taman kota yang terkelola dalam satu tahun	Taman	NA	14	5.441.447.600,00	14	9.040.822.707,42		
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah jenis sarpras taman kota yang dipelihara	Jumlah jenis sarpras taman kota yang dipelihara dalam satu tahun	Jenis	7	4	2.200.450.000,00	4	6.147.054.648,60		
		Jumlah jenis sarpras taman kota yang tersedia	Jumlah jenis sarpras taman kota yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	6	1		1			
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	NA	7	3.240.997.600,00	7	2.893.768.058,82		
		Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati yang terpelihara dalam satu tahun	Jenis	NA	7		7			
	Tujuan 4 : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbunan sampah x 100%)	Persen	92,1	93	14.155.785.929,00	97,73	13.930.300.765,70		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	(Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat/Jumlah total pelaku usaha penghasil limbah B3) x 100%)	Persen	67	67	42.297.800,00	60	26.232.000,00		
	Sasaran 4 : Capaian layanan persampahan perkotaan	Jumlah Persentase penanganan sampah + persentase pengurangan sampah	Jumlah Persentase penanganan sampah + persentase pengurangan sampah	Persen	92,5	94	14.155.785.929,00	97,73	13.930.300.765,70		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	((Volume sampah tertangani / timbunan sampah) x 100%)	Persen	82,88	83	16.269.473.260,00	84,2	13.038.166.139,70		
		Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	((Volume sampah yang dikelola berbasis 3R / timbunan sampah) x 100%)	Persen	9,62	11		12,53			
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani	Volume sampah tertangani dalam satu tahun	Ton	NA	22.508,66	16.269.473.260,00	22.508,66	13.038.166.139,70		
		Volume sampah yang berkurang	Volume sampah yang berkurang dalam satu tahun	Ton	NA	3.113,19		3.113,19			
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras penanganan sampah yang terpelihara	Jumlah sarpras penanganan sampah yang terpelihara dalam satu tahun	Jenis	2	8	15.634.005.760,00	8	12.170.565.689,70		
		Jumlah sarpras penanganan sampah yang tersedia	Jumlah sarpras penanganan sampah yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	7	7		7			
		Jumlah lokasi kerja yang terlayani	Jumlah lokasi kerja yang terlayani dalam satu tahun	Lokasi	25	25		25			
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok yang dibina (Pengirit, Pemilah, Bank Sampah, pelapak sampah)	Jumlah kelompok yang dibina (Pengirit, Pemilah, Bank Sampah, pelapak sampah) dalam satu tahun	Kelompok	3	3	635.467.500,00	3	867.600.450,00		
		Jumlah lomba (bank sampah)	Jumlah lomba bank sampah yang diselenggarakan dalam satu tahun	Jenis	1	1		1			
		Jumlah peserta pembinaan	Jumlah peserta pembinaan dalam satu tahun	Orang	300	400		400			
		Jumlah jenis sarana prasarana pengurangan sampah yang tersedia	Jumlah jenis sarana prasarana pengurangan sampah yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	NA	8		8			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	((Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina / jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan di Kota Blitar) x 100%)	Persen	100	100	587.347.900,00	100	514.118.887,00		
2.11.08.2.01	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina</i>	<i>Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina dalam satu tahun</i>	<i>Kelompok</i>	<i>NA</i>	<i>21</i>	<i>587.347.900,00</i>	<i>21</i>	<i>560.934.887,00</i>		
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis sarana / akses informasi dan publikasi yang tersedia	Jumlah jenis sarana / akses informasi dan publikasi yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	NA	2	389.388.100,00	2	379.318.187,00		
		Jumlah jenis pembinaan untuk kelompok masyarakat	Jumlah jenis pembinaan untuk kelompok masyarakat dalam satu tahun	Jenis	NA	5		5			
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Fasilitasi Gerdu Kasih	Jumlah lokasi fasilitasi Gerdu Kasih dalam satu tahun	Lokasi	NA	21	197.959.800,00	21	181.616.700,00		
		Jumlah jenis sarpras Gerdu Kasih (peralatan kerja) yang tersedia	Jumlah jenis sarpras Gerdu Kasih (peralatan kerja) yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	NA	7		7			
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari peringatan LH yang terlaksana	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari peringatan LH yang terlaksana dalam satu tahun	Kali	NA	1		1			
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri	((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah kelurahan x jumlah predikat yang seharusnya diperoleh (3 prestasi)) x 100%	Persen	38,1	44,44	383.600.800,00	44,44	331.219.239,00		
		Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah sekolah x jumlah predikat seharusnya (4 prestasi)) x 100%	Persen	17,48	21,84		21,84			
		Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	Jumlah predikat yang didapat dalam satu tahun	Kali	1	1		1			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh dalam satu tahun	Predikat	NA	14	383.600.800,00	14	331.219.239,00		
		Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh dalam satu tahun	Predikat	NA	51		51			
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kelurahan yang masuk kriteria kelurahan berseri	Jumlah kelurahan yang masuk kriteria kelurahan berseri dalam satu tahun	Kelurahan	NA	28	383.600.800,00	38	331.219.239,00		
		Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata) yang dibina	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata) yang dibina dalam satu tahun	Sekolah	NA	90		90			
	Sasaran 5 : Meningkatkan pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	((Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3) x 100%)	Persen	NA	70	42.297.800,00	70	26.232.000,00		
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	(Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan / Jumlah total pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang dipantau) x 100%	Persen	100	100	20.689.100,00	100	26.232.000,00		
2.11.05.2.02	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan dalam satu tahun	Usaha/ Kegiatan	NA	35	20.689.100,00	35	26.232.000,00		
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang dibina	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang dibina dalam satu tahun	Usaha/Kegiatan	NA	70	20.689.100,00	60	26.232.000,00		
	Tujuan 5 :	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	A		A			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Perangkat Daerah					7.280.421.962,00		7.134.951.690,44		
	Sasaran 6 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	A	7.280.421.962,00	A	7.134.951.690,44		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dalam satu tahun	Nilai	78,06	78,5	7.280.421.962,00	84,59	7.134.951.690,44		
2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar/ dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun) X 100%	Persen	100	100	35.568.000,00	100	35.346.000,00		
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA) dalam satu tahun	Jenis	6	5	10.020.000,00	5	9.992.500,00		
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen IKM yang tersusun	Jumlah jenis dokumen IKM yang tersusun dalam satu tahun	Jenis	1	1	25.548.000,00	1	25.353.500,00		
2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar/ Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan) x 100%	Persen	100	100	6.134.988.097,00	100	5.902.620.259,00		
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun	Orang	NA	59	6.130.488.897,00	59	5.898.256.759,00		
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran) dalam satu tahun	Dokumen	5	3	4.499.200,00	3	4.363.500,00		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
2.11.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar/ Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah) $\times$ 100%	Persen	100	100	58.502.100,00	100	68.192.400,00		
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah dalam satu tahun	Jenis	3	1	58.502.100,00	1	68.192.400,00		
		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti dalam satu tahun	Event	0	5		5			
2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Administrasi umum perangkat daerah sesuai standar/ administrasi umum perangkat daerah yang tersedia) $\times$ 100%	Persen	100	100	388.739.100,00	100	796.282.782,44		
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	38	9	5.477.500,00	9	5.467.000,00		
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	8	3	32.000.000,00	3	87.376.000,00		
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	8	2	7.743.100,00	2	7.688.500,00		
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	50	54	109.381.200,00	54	357.729.369,44		
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia dalam satu tahun	Dos/kotak	1.187	1.095		1185			
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan yang tersedia	Jumlah Jenis barang cetakan yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	24	14	17.412.900,00	14	17.010.700,00		
		Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia dalam satu tahun	Lembar	7.253	12.391		19271			
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia dalam satu tahun	Buah	36	3	6.726.000,00	3	5.740.000,00		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti dalam satu tahun	Rapat	9	45	209.998.400,00	77	315.271.213,00		
2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar/ penyediaan jasa penunjang urusan yang dilaksanakan) $\times$ 100%	Persen	NA	100	65.599.351,00	100	71.145.748,00		
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (listrik, telepon, internet)	Jumlah rekening yang terbayarkan (listrik, telepon, internet dalam satu tahun	Rekening	3	3	65.599.351,00	3	71.145.748,00		
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(BMD yang terpelihara sesuai standar/ BMD yang terpelihara) $\times$ 100%	Persen	NA	100	170.801.200,00	100	261.364.501,00		
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya dalam satu tahun	Kendaraan	5	36	110.154.700,00	30	168.654.001,00		
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara dalam satu tahun	Unit	8	3		3			
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dalam satu tahun	Jenis	14	4	28.856.600,00	4	43.243.500,00		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara dalam satu tahun	Unit	2						
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dalam satu tahun	Jenis	9	2	31.789.900,00	2	49.467.000,00		

Tabel 6.1.b. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp		
	Unsur Penunjang Urusan Lingkungan Hidup								
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	Indeks	56,32	61,72	810.521.020,00		
	Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	(Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu / jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%	persen	NA	82,50	810.521.020,00		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	(Jumlah titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu / Jumlah total titik sampling badan air) x 100%	persen	52,63	55,00	416.953.120,00		
2.11.03.2.01	<i>Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang terlaksana</i>	<i>Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang terlaksana pada tahun berjalan</i>	<i>aksi</i>	<i>NA</i>	<i>3</i>	<i>416.953.120,00</i>		
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut pada tahun berjalan	dokumen	NA	1	416.953.120,00		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	(Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / Jumlah total kasus/aduan lingkungan hidup) x 100%	persen	100,00	100,00	50.000.000,00		
2.11.10.2.01	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kasus/ aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</i>	<i>Jumlah kasus/ aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan</i>	<i>kasus/ aduan</i>	<i>NA</i>	<i>1</i>	<i>50.000.000,00</i>		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp		
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani pada tahun berjalan	pengaduan	NA	1	50.000.000,00		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	(Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup / Jumlah total pelaku usaha yang dipantau) x 100%	persen	64,00	64,00	143.567.900,00		
2.11.06.2.01	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup pada tahun berjalan</i>	<i>usaha</i>	<i>NA</i>	<i>60</i>	<i>143.567.900,00</i>		
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan pada tahun berjalan	dokumen	NA	12	51.838.587,06		
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	laporan	NA	60	91.729.312,94		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	(Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia / Jumlah total dokumen perencanaan lingkungan hidup) x 100%	persen	100,00	100,00	200.000.000,00		
2.11.02.2.01	<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun pada tahun berjalan</i>	<i>dokumen</i>	<i>NA</i>	<i>1</i>	<i>75.000.000,00</i>		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp		
	<i>(RPPLH) Kabupaten/ Kota</i>								
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun pada tahun berjalan	dokumen	NA	1	75.000.000,00		
2.11.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang tersusun</i>	<i>Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang tersusun pada tahun berjalan</i>	<i>dokumen</i>	<i>NA</i>	<i>2</i>	<i>125.000.000,00</i>		
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun pada tahun berjalan	dokumen	NA	2	125.000.000,00		
	Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	indeks	82,63	85,48	1.357.978.647,00		
	Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	(Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu / Jumlah kawasan yang ditetapkan) x 100%	persen	NA	100	1.357.978.647,00		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	(Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu / jumlah total titik sampling udara ambien yang dipantau) x 100%	persen	NA	100	1.357.978.647,00		
		Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ eq)	((Nilai Proyeksi Emisi GRK - Nilai Emisi GRK hasil perhitungan http://signsmart.menlhk.go.id/)/Nilai Proyeksi Emisi GRK) x 100 %	persen	100	7			
2.11.03.2.01	<i>Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu</i>	<i>Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu pada tahun berjalan</i>	<i>titik</i>	<i>NA</i>	<i>18</i>	<i>1.357.978.647,00</i>		
		<i>Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim</i>	<i>Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim pada tahun berjalan</i>	<i>kali</i>	<i>NA</i>	<i>3</i>			
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen	NA	1	1.357.978.647,00		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp		
	Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	indeks	54,23	55,73	9.289.000.000,00		
	Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	persen	NA	100	9.289.000.000,00		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	Luas RTH Publik x 100% / Luas Wilayah Kota Blitar	persen	16,27	16,27	9.289.000.000,00		
2.11.04.2.01	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i>	<i>Luas RTH Publik yang Terkelola</i>	<i>Luas RTH Publik yang Terkelola pada tahun berjalan</i>	<i>ha</i>	<i>NA</i>	<i>420,34</i>	<i>9.289.000.000,00</i>		
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola pada tahun berjalan	unit	NA	13	9.289.000.000,00		
	Tujuan 4 : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbulan sampah x 100%)	persen	92,1	94			
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	(Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat/Jumlah total pelaku usaha penghasil limbah B3) x 100%)	persen	67	72			
	Sasaran 4 : Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Persentase sampah terkelola	Jumlah Persentase penanganan sampah + persentase pengurangan sampah	persen	92,5	94,99	23.914.421.600,00		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	((Volume sampah tertangani / timbulan sampah) x 100%)	persen	82,88	83,1	22.900.000.000,00		
		Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	((Volume sampah yang dikelola berbasis 3R / timbulan sampah) x 100%)	persen	9,62	11,89			
2.11.11.2.01	<i>Pengelolaan Sampah</i>	<i>Volume sampah tertangani</i>	<i>Volume sampah tertangani pada tahun berjalan</i>	<i>ton</i>	<i>NA</i>	<i>22.666,52</i>	<i>22.900.000.000,00</i>		
		<i>Volume sampah yang berkurang</i>	<i>Volume sampah yang berkurang pada tahun berjalan</i>	<i>ton</i>	<i>NA</i>	<i>3.386,95</i>			
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan pada tahun berjalan	dokumen	NA	1	10.000.000,00		
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan,	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan,	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses	ton	NA	26503,47	7.000.000.000,00		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp		
	Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota pada tahun berjalan						
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat pada tahun berjalan	kelompok	NA	3	1.000.000.000,00		
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir pada tahun berjalan	unit	NA	11	14.890.000.000,00		
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	((Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina / jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan di Kota Blitar) x 100%)	persen	1	100	587.347.900,00		
2.11.08.2.01	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina</i>	<i>Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina pada tahun berjalan</i>	<i>kelompok</i>	<i>NA</i>	<i>21</i>	<i>587.347.900,00</i>		
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH pada tahun berjalan	lembaga	NA	14	351.460.793,25		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp		
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen	NA	3	235.887.106,75		
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri	((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah kelurahan x jumlah predikat yang seharusnya diperoleh (3 prestasi)) x 100%	persen	38,1	47,62	427.073.700,00		
		Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiviyata)	((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah sekolah x jumlah predikat seharusnya (4 prestasi)) x 100%	persen	17,48	24,03			
		Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	Jumlah predikat yang didapat dalam satu tahun	kali	1	1			
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh pada tahun berjalan	predikat	NA	16	427.073.700,00		
		Jumlah predikat adiviyata yang diperoleh	Jumlah predikat adiviyata yang diperoleh pada tahun berjalan	predikat	NA	56			
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH pada tahun berjalan	entitas	NA	5	427.073.700,00		
	Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik / Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang ditetapkan) x 100%	persen	NA	72,5			
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	(Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan / Jumlah total pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang dipantau) x 100%	persen	100	100	30.999.100,00		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp		
2.11.05.2.02	<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah usaha dan/ atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan</i>	<i>Jumlah usaha dan/ atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan pada tahun berjalan</i>	<i>usaha/ kegiatan</i>	<i>N/A</i>	<i>40</i>	<i>30.999.100,00</i>		
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	dokumen	NA	1	30.999.100,00		
	Tujuan 5 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	86 (A)	86 (A)			
	Sasaran 6 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	86 (A)	86 (A)	7.536.838.987,00		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Indeks	78,06	79	7.536.838.987,00		
2.11.01.2.01	<i>Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar</i> <i>----- x 100%</i> <i>Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun</i>	<i>persen</i>	<i>N/A</i>	<i>100</i>	<i>44.871.539,00</i>		
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	dokumen	NA	5	9.828.000,00		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp		
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	laporan	NA	2	35.043.539,00		
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	$\frac{\text{Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar}}{\text{Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani}} \times 100 \%$	persen	100	100	6.298.697.251,00		
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	orang/ bulan	NA	57	6.294.347.701,00		
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada tahun berjalan	laporan	NA	4	4.349.550,00		
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar}}{\text{jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani}} \times 100\%$	persen	100	100	156.279.100,00		
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun berjalan	paket	NA	3	68.100.000,00		
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	orang/ bulan	NA	69	88.179.100,00		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp		
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar}}{\text{Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan}} \times 100\%$	persen	100	100	368.479.769,00		
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	NA	1	5.720.299,00		
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paet	NA	6	51.109.453,00		
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	NA	4	6.446.318,00		
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	NA	20	62.358.000,00		
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	NA	1	25.167.299,00		
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	dokumen	NA	36	7.680.000,00		
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat pada tahun berjalan Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	laporan	NA	50	209.998.400,00		
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan}}{\text{Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan}} \times 100 \%$	persen	NA	100	63.190.280,00		
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	NA	0	-		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp		
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	NA	6	14.369.563,00		
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	NA	7	48.820.717,00		
2.11.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	NA	0	-		
2.11.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	NA	0	-		
2.11.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	NA	0	-		
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	NA	0	-		
2.11.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	<i>Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar</i> $\frac{\text{Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar}}{\text{Jml penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan}} \times 100 \%$	<i>persen</i>	<i>NA</i>	<i>100</i>	<i>330.798.151,00</i>		
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	NA	36	65.598.151,00		
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	NA	26	265.200.000,00		
2.11.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	<i>Jumlah jenis BMD yang terpelihara</i> $\frac{\text{Jumlah jenis BMD yang terpelihara}}{\text{Jumlah jenis BMD yang harus dipelihara}} \times 100\%$	<i>persen</i>	<i>NA</i>	<i>100</i>	<i>274.522.897,00</i>		
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	unit	NA	39	131.149.500,00		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp		
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	NA	69	5.520.000,00		
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	NA	101	48.983.300,00		
2.11.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	NA	0	-		
2.11.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	NA	0	-		
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	NA	1	50.000.000,00		
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	NA	425	38.870.097,00		

Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Unsur Penunjang Urusan Lingkungan Hidup													
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	Indeks	63,52		65,32		67,12		67,12			
	Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	(Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu / jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%	persen	85,00		85,00		90,00		90,00			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	(Jumlah titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu / Jumlah total titik sampling badan air) x 100%		56,00	1.289.000.000	57,00	1.289.000.000	58,00	1.310.000.000	58,00	4.721.906.240		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang terlaksana pada tahun berjalan	aksi	3	1.289.000.000	3	1.289.000.000	3	1.310.000.000	15	4.721.906.240		
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut pada tahun berjalan	dokumen	1	1.289.000.000	1	1.289.000.000	1	1.310.000.000	4	4.304.953.120		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	(Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / Jumlah total kasus/aduan lingkungan hidup) x 100%	persen	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	219.997.400		
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan	kasus/a duan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	219.997.400		
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani pada tahun berjalan	pengad uan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	219.997.400		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	(Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup / Jumlah total pelaku usaha yang dipantau) x 100%	persen	65,00	210.854.400	65,00	210.854.400	65,00	331.854.400	65,00	1.040.699.000		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup pada tahun berjalan	usaha	60	210.854.400	60	210.854.400	60	331.854.400	300	1.040.699.000		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota													
2.11.06.2.0 1.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan pada tahun berjalan	dokum en	12	76.133.970	12	76.133.970	12	119.823.883	50	357.727.009		
2.11.06.2.0 1.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi pada tahun berjalan	badan usaha	60	134.720.430	60	134.720.430	60	212.030.517	180	481.471.378		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	(Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia / Jumlah total dokumen perencanaan lingkungan hidup) x 100%	persen	100	200.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	1.095.787.500		
2.11.02.2.0 1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi araban/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir araban RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi araban/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir araban RPPLH Provinsi pada tahun berjalan	dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	620.787.500		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Dacrah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.11.02.2.0 1.0006	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun pada tahun berjalan	dokum en	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	620.787.500		
2.11.02.2.0 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun pada tahun berjalan	dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	5	475.000.000		
2.11.02.2.0 2.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun pada tahun berjalan	dokum en	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	5	475.000.000		
		Indeks kualitas udara	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	Indeks	86,43		87,38		87,40		87,40			
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	(Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu / Jumlah kawasan yang ditetapkan) x 100%	persen	100		100		100		100			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	(Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu / jumlah total titik sampling udara ambien yang dipantau) x 100%	persen	100	2.519.400.00 0	100	2.577.400.00 0	100	2.619.400.00 0	100	9.994.204.17 4		
		Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	((Nilai Proyeksi Emisi GRK - Nilai Emisi GRK hasil perhitungan http://signsmart.menlhk.go.id)/Nilai Proyeksi Emisi GRK) x 100 %	persen	8,95		11,69		15,15		15,15			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu pada tahun berjalan	titik	18	2.519.400.000	18	2.577.400.000	18	2.619.400.000	90	9.994.204.174		
		Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim pada tahun berjalan	kali	3		3		3		15			
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen	1	2.519.400.000	1	2.577.400.000	1	2.619.400.000	4	9.074.178.647		
		Indeks kualitas lahan	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	Indeks	56,23		56,73		56,78		56,78			
		Persentase RTH yang terkelola	((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	persen	100		100		100		100			
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	Luas RTH Publik x 100% / Luas Wilayah Kota Blitar	persen	16,27	9.789.000.000	16,27	9.789.000.000	16,28	4.789.000.000	16,28	39.097.447.600		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Luas RTH Publik yang Terkelola	Luas RTH Publik yang Terkelola pada tahun berjalan	ha	420,34	9.789.000.000	420,34	9.789.000.000	420,34	4.789.000.000	1695,36	39.097.447.600		
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola pada tahun berjalan	unit	14	9.789.000.000	15	9.789.000.000	16	4.789.000.000	58	33.656.000.000		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Persentase capaian layanan persampahan	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbunan sampah x 100%)	persen	95,00		96,00		98,00		98,00			
		Persentase sampah terkelola	(Jumlah volume sampah terkelola / Jumlah timbunan sampah dalam satu tahun) x 100%	persen	96,00		98,00		98,00		98,00			
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	((Volume sampah tertangani / timbunan sampah) x 100%)	persen	83,15	19.710.598.000	83,16	19.710.598.000	83,18	19.710.598.000	83,18	98.301.267.260		
		Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	((Volume sampah yang dikelola berbasis 3R / timbunan sampah) x 100%)	persen	12,85		14,84		14,82		14,82			
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani	Volume sampah tertangani pada tahun berjalan	ton	22.808,21	19.710.598.000	22.950,27	19.710.598.000	23.109,62	19.710.598.000	114.043,28	98.301.267.260		
		Volume sampah yang berkurang	Volume sampah yang berkurang pada tahun berjalan	ton	3.680,54		3.977,45		4.542,92		18.701,05			
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat pada tahun berjalan	kelompok	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	12	4.000.000.000		
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	unit	11	11.690.598.000	11	11.680.598.000	11	11.670.598.000	44	49.931.794.000		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir pada tahun berjalan											
2.11.11.2.0 1.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan pada tahun berjalan	dokum en	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	4	100.000.000		
2.11.11.2.0 1.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	(Luas jalan yang dilakukan penyapuan / Luas jalan di Kota Blitar) x 100%	persen	90	7.000.000.000	90	7.000.000.000	90	7.000.000.000	90	21.000.000.000		
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	((Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina / jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan di Kota Blitar) x 100%)	persen	100	600.000.000	100	625.000.000	100	650.000.000	100	3.049.695.800		
2.11.08.2.0 1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatiban, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina pada tahun berjalan	kelompo ke	21	600.000.000	21	625.000.000	21	650.000.000	105	3.049.695.800		
2.11.08.2.0 1.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan pada tahun berjalan	dokum en	3	250.000.000	3	262.500.000	3	275.000.000	12	1.023.387.107		
2.11.08.2.0	Peningkatan Kapasitas	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	lembag	14		14		14		42			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.0005	dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat /komunitas /kelompok masyarakat	pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH pada tahun berjalan	a		350.000.000		362.500.000		375.000.000		1.087.500.000		
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri	((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah kelurahan x jumlah predikat yang seharusnya diperoleh (3 prestasi)) x 100%	persen	50,79	467.073.700	53,97	482.073.700	57,14	552.073.850	57,14	2.311.895.750		
		Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah sekolah x jumlah predikat seharusnya (4 prestasi)) x 100%	persen	26,21		28,4		30,58		30,58			
		Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	Jumlah predikat yang didapat dalam satu tahun	kali	1		1		1		5			
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh pada tahun berjalan	predikat	18	467.073.700	20	482.073.700	21	552.073.850	89	2.311.895.750		
		Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh pada tahun berjalan	predikat	61		66		71		305			
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	entitas	5	467.073.700	5	482.073.700	5	552.073.850	20	1.928.294.950		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH pada tahun berjalan											
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	(Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat/Jumlah total pelaku usaha penghasil limbah B3) x 100%)	persen	72,00		75,00		75,00		75,00			
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik / Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang ditetapkan) x 100%	Persen	75,00		75,00		80,00		80			
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	(Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan / Jumlah total pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang dipantau) x 100%	persen	100	40.999.100	100	50.999.100	100	50.999.100	100	194.685.500		
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaba dan/ atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan pada tahun berjalan	usaha dan/ ata u kegiatan	45	40.999.100	50	50.999.100	55	50.999.100	225	194.685.500		
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan	dokum en	1	40.999.100	1	50.999.100	1	50.999.100	4	194.685.500		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya											
	Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	nilai	87 (A)		88 (A)		89 (A)		89 (A)			
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	nilai	87 (A)		88 (A)		89 (A)		89 (A)			
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	nilai	79,5	8.231.229.966	80	7.985.699.123	80,5	8.906.667.195	80,5	39.940.857.233		
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar}}{\text{Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun}} \times 100\%$	persen	100	49.358.693	100	54.294.562	100	59.724.018	100	243.816.812		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.11.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	dokum en	11	10.810.800	11	11.891.880	11	13.081.068	38	45.611.748		
2.11.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	laporan	7	38.547.893	7	42.402.682	7	46.642.950	23	162.637.064, 50		
2.11.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100 % Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	persen	100	6.799.274.05 6	100	6.570.547.62 3	100	7.285.000.54 4	100	33.088.507.5 71		
2.11.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	orang	57	6.794.489.55 1	57	6.565.284.66 7	57	7.279.211.29 3	228	26.933.333.2 12		
2.11.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun berjalan	laporan	4	4.784.505	4	5.262.956	4	5.789.251	16	20.186.262		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar}}{\text{jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani}} \times 100\%$	persen	100	176.907.010	100	144.597.711	100	159.057.482	100	695.343.403		
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun berjalan	paket	3	79.910.000	3	62.901.000	3	69.191.100	12	280.102.100,00		
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	orang	69	96.997.010	69	81.696.711	69	89.866.382	276	356.739.203,10		
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar}}{\text{Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan}} \times 100\%$	persen	100	445.327.746	100	439.860.520	100	533.846.573	100	2.176.253.708		
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	1	6.292.329	1	6.921.562	1	7.613.718	4	26.547.908		
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	6	56.220.398	6	61.842.438	6	68.026.682	24	237.198.971		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.11.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	4	7.090.950	4	7.800.045	4	8.580.049	16	29.917.362		
2.11.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	21	73.593.800	22	80.953.180	23	114.048.498	86	330.953.478		
2.11.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	1	27.684.029	1	30.452.432	1	33.497.675	4	116.801.435		
2.11.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	dokum en	36	8.448.000	36	9.292.800	36	10.222.080	144	35.642.880		
2.11.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat pada tahun berjalan Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	laporan	50	265.998.240	50	242.598.064	50	291.857.870	200	1.010.452.574		
1.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	persen	100	69.509.308	100	126.460.239	100	134.106.263	100	393.266.089		
1.02.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	6	15.806.519	6	17.387.171	10	69.125.888	28	116.689.142		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	7	53.702.789	7	59.073.068	7	64.980.374	28	226.576.948		
1.02.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	0	0	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000		
2.11.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	persen	100	363.877.966	100	400.265.763	100	440.292.339	100	1.600.833.570		
2.11.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	36	72.157.966	36	79.373.763	36	87.311.139	144	304.441.019		
2.11.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	26	291.720.000	26	320.892.000	26	352.981.200	104	1.230.793.200		
2.11.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	persen	100	326.975.187	100	249.672.705	100	294.639.976	100	1.316.611.965		
2.11.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	unit	39	119.264.450	39	81.190.895	39	114.309.985	156	445.914.830		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat at daerah penang gung jawab	Lok asi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan											
1.02.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	69	6.072.000	69	6.679.200	69	7.347.120	276	25.618.320		
2.11.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	102	58.881.630	103	64.769.793	104	71.246.772	410	243.881.495		
1.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	250.000.000		
2.11.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i pada tahun berjalan	unit	425	42.757.107	425	47.032.817	425	51.736.099	1700	180.396.120		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bab ini diuraikan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026. Adapun Indikator Kinerja Sasaran program Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini :

- a. Tabel 7.1.a Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- b. Tabel 7.1.b Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- c. Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- d. Tabel 7.3 IKU Perangkat Daerah (sesuai IKU di RPJMD dan Perwali IKU)
- e. Tabel 7.4 IKK Perangkat Daerah (sesuai IKK di RPJMD)

Tabel. 7.1.a
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022
Meningkatnya kualitas air	Tujuan : Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	59,92
	Sasaran : Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	80
Meningkatnya kualitas udara	Tujuan : Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	84,53
	Sasaran : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	92,86
		Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	80
Meningkatnya kualitas lahan	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	55,23
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	96,1
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	93
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	67
	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	94
	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	70
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)

Tabel. 7.1.b
Tabel 7.1.b Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023
Meningkatnya kualitas air	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	61,72
	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	82,50
Meningkatnya kualitas udara	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	85,48
	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100
Meningkatnya kualitas lahan	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	55,73
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	100
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	94
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	72
	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	94,99
	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	72,5
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas air	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	63,52	65,32	67,12	67,12
Meningkatnya kualitas udara		Indeks kualitas udara	86,43	87,38	87,40	87,40
Meningkatnya kualitas lahan		Indeks kualitas lahan	56,23	56,73	56,78	56,78
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3		Persentase capaian layanan persampahan	95%	96%	98%	98%
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	72%	75%	75%	75%
	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	85,00	85,00	90,00	90,00
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100%	100%	100%	1,00
		Persentase RTH yang terkelola	100	100	100	100,00
		Persentase sampah terkelola	96,00	98,00	98,00	98,00
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	75,00	75,00	80,00	80,00
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 (A)	88 (A)	89 (A)	89 (A)
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 (A)	88 (A)	89 (A)	89 (A)

Tabel 7.3
IKU Perangkat Daerah (sesuai IKU di RPJMD dan Perwali IKU)

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu (PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) Penentuan Kategori Indeks Kualitas Air : 1.Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2.Baik $70 \leq x < 90$ 3.Sedang $50 \leq x < 70$ 4.Kurang $25 \leq x < 50$ 5.Sangat Kurang $0 \leq x < 25$	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	59,92 Indeks	61,72 Indeks	63,52 Indeks	65,32 Indeks	67,12 Indeks	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Data hasil sampling badan air
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. (PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP)	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	84,53 Indeks	85,48 Indeks	86,43 Indeks	87,38 Indeks	87,40 Indeks	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Data hasil sampling udara ambien

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2022	2023	2024	2025	2026		
			Penentuan Kategori Indeks Kualitas Udara: 1.Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2.Baik $70 \leq x < 90$ 3.Sedang $50 \leq x < 70$ 4.Kurang $25 \leq x < 50$ 5.Sangat Kurang $0 \leq x < 25$								
3	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Penentuan Kategori Indeks Kualitas Lahan: 1.Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2.Baik $70 \leq x < 90$ 3.Sedang $50 \leq x < 70$ 4.Kurang $25 \leq x < 50$ 5.Sangat Kurang $0 \leq x < 25$	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	55,23 Indeks	55,73 Indeks	56,23 Indeks	56,73 Indeks	56,78 Indeks	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Data kualitas lahan
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	Capaian Kinerja Layanan/ Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbulan sampah x 100%)	93%	94%	95%	96%	98%	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Data capaian layanan persampahan

Tabel 7.4
IKK Perangkat Daerah (sesuai IKK di RPJMD)

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN-KE					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan.	Nilai IKLH = $(0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$ IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lahan	Indeks	66,52	68.86	70.03	71.20	72.37	73.54	73.54
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	Pengelolaan sampah di wilayah adalah Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	$(\text{Jumlah volume sampah terolah} / \text{jumlah total timbulan sampah} \times 100\%)$	Persen	NA	93	94	95	96	98	98
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota - Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan	$(\text{Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup} / \text{Jumlah total pelaku usaha yang dipantau}) \times 100\%$	Persen	64	64	64	65	65	65	65

[illegible]

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra DLH tahun 2021-2026 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Kota Blitar di bidang Lingkungan Hidup. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan *stakeholders*. Perencanaan yang baik dan sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh sarana prasarana juga anggaran yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar sebagai instansi yang kredibel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka perlu dilakukan akan dilakukan penyesuaian. Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar selama 5 tahun periode mendatang.